

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan izin bongkar muat barang berbahaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keselamatan pelayaran serta keamanan lingkungan maritim. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar agen pelayaran telah berupaya memenuhi kewajiban administrasi, masih ditemukan kendala berupa ketidaklengkapan dokumen, keterlambatan penyerahan, dan variasi pemahaman agen terhadap persyaratan yang berlaku. Permasalahan ini berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan memperlambat proses verifikasi dokumen. Analisis yang dilakukan memperlihatkan bahwa strategi yang berjalan saat ini masih bersifat konvensional, sehingga efektivitasnya belum optimal. Oleh karena itu, rancangan program perbaikan yang disusun menekankan pada peningkatan sosialisasi regulasi, digitalisasi pelayanan perizinan, penyusunan checklist dokumen standar, monitoring dan evaluasi berkala, serta penerapan reward and punishment. Penerapan program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan agen, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung prinsip keselamatan pelayaran sesuai standar nasional maupun internasional.

4.2 Saran

4.2.1 Bagi Kantor KSOP Kelas 1 Panjang

1. Meningkatkan sosialisasi regulasi secara rutin kepada agen pelayaran agar pemahaman terhadap kewajiban administrasi menjadi lebih merata.

2. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital untuk mempercepat verifikasi dokumen, meminimalisasi kesalahan administratif, dan meningkatkan transparansi pelayanan.
3. Menerapkan sistem reward and punishment secara konsisten, sehingga agen lebih termotivasi untuk patuh terhadap kelengkapan dokumen.
4. Menyusun dan mempublikasikan checklist standar dokumen yang wajib dipenuhi agar agen memiliki pedoman yang jelas dan praktis.
5. Meningkatkan kapasitas petugas KSOP melalui pelatihan teknis terkait regulasi barang berbahaya dan keselamatan pelayaran sehingga proses verifikasi berjalan lebih akurat.

5.1.2 Bagi IIB Darmajaya

1. Memperluas kerja sama dengan instansi pemerintah dan sektor transportasi laut, agar mahasiswa mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mempelajari praktik administrasi publik secara langsung.
2. Meningkatkan pembekalan pra-kerja praktik, khususnya terkait regulasi dan teori administrasi publik, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi permasalahan nyata di lapangan.
3. Mendorong penelitian lanjutan di bidang pelayanan publik dan kepelabuhanan, agar hasil kerja praktik dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan di sektor transportasi laut.
4. Memfasilitasi forum evaluasi kerja praktik antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan instansi mitra, sehingga rekomendasi yang diberikan mahasiswa dapat memberikan manfaat praktis.